

Legitimasi Sosial Transformasi Kelembagaan UPTD PLUT UMKM: Analisis Ekspektasi dan Tantangan Transparansi Layanan di Kabupaten Tabalong

Adam Samsudin Noor¹, Mahrini², Syatria Adymas Pranajaya³

^{1,2} Universitas Sapta Mandiri, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email Correspondensi: adamsamsudin@univsm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the opinions of the Tabalong Regency community regarding the establishment of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) for the Integrated Business Service Center (PLUT) for Cooperatives and MSMEs as a consideration for institutional status improvement. This study uses a quantitative approach with a survey method. The sample consists of 119 respondents selected through a simple random sampling technique, and data were collected using a Likert scale-based questionnaire. The results show very high support and optimism from the community, with 91% of respondents stating that the UPTD is needed to facilitate service access, and 88% believing it will drive local economic growth. However, there are critical notes in the form of community concerns regarding the potential increase in service costs (60%) and the lack of clarity of information regarding the UPTD's functions (59%). Furthermore, 82% of respondents demand service digitalization through online platforms. In conclusion, the establishment of the UPTD PLUT KUMKM has strong social legitimacy in the eyes of the public, but it requires a transparent communication strategy, service digitalization, and active public participation to ensure its successful implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini masyarakat Kabupaten Tabalong terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM sebagai bahan pertimbangan peningkatan status kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel terdiri dari 119 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling, dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan dukungan dan optimisme yang sangat tinggi dari masyarakat, di mana 91% responden menyatakan UPTD diperlukan untuk mempermudah akses layanan, dan 88% meyakini lembaga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, terdapat catatan kritis berupa kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan biaya layanan (60%) dan kurangnya kejelasan informasi terkait fungsi UPTD (59%). Selain itu, 82% responden menuntut adanya digitalisasi layanan melalui platform daring. Kesimpulannya, pembentukan UPTD PLUT KUMKM memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata publik, namun memerlukan strategi komunikasi yang transparan, digitalisasi layanan, dan partisipasi publik yang aktif untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

KEYWORDS:

UPTD PLUT KUMKM; Public Opinion; MSME Empowerment.

KATA KUNCI:

UPTD PLUT KUMKM; Opini Masyarakat; Pemberdayaan UMKM.

How to Cite:

“Noor, A. S. ., Mahrini, & Pranajaya, S. A. . (2026). Legitimasi Sosial Transformasi Kelembagaan UPTD PLUT UMKM: Analisis Ekspektasi dan Tantangan Transparansi Layanan di Kabupaten Tabalong. *GENRES : Journal of General Studies and Research*, 1(3), 374-387.”

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beserta koperasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan ketahanan ekonomi daerah (Boy et al., 2022). Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan pemulihan ekonomi, keberadaan UMKM menjadi katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pemberdayaan UMKM di tingkat lokal tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di berbagai wilayah di Indonesia (Said & Ferdhianzah, 2025).

Meskipun memiliki kontribusi yang vital, sektor UMKM dan koperasi masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta lambatnya adopsi teknologi digital dan perluasan jaringan pemasaran. Hambatan-hambatan ini menuntut adanya intervensi pemerintah yang tidak bersifat parsial, melainkan melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi (Kirana et al., 2023). Studi dari penelitian-penelitian terdahulu menegaskan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan pendampingan yang berkelanjutan, mayoritas UMKM akan kesulitan untuk melakukan transformasi, naik kelas, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Mulyaningsih et al., 2022; Radyanto et al., 2023).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM hadir sebagai instrumen kebijakan strategis untuk menyediakan layanan non-finansial yang menyeluruh. UPTD PLUT KUMKM dirancang untuk memfasilitasi pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, inovasi produksi, hingga aksesibilitas pasar dan teknologi e-commerce. Menurut beberapa penelitian terdahulu, transformasi status kelembagaan menjadi UPTD memberikan legitimasi dan kewenangan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam mengorkestrasi program-program pemberdayaan UMKM secara terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada dampak ekonomi lokal (Fuadi et al., 2026; Sadly et al., 2026).

Meskipun urgensi penguatan kelembagaan PLUT KUMKM telah banyak dikaji dalam literatur sebelumnya, state of the art penelitian terkait umumnya berfokus pada evaluasi dampak pasca-implementasi program pemberdayaan UMKM, analisis kebijakan dari perspektif top-down, atau transformasi kelembagaan di tingkat provinsi dan nasional. Studi yang secara spesifik mengukur legitimasi sosial dan ekspektasi masyarakat pada tahap pra-pembentukan (ex-ante) di tingkat kabupaten, khususnya yang mengaitkannya dengan tuntutan digitalisasi dan transparansi biaya, masih sangat terbatas. Kesenjangan literatur (research gap) ini menunjukkan bahwa pemetaan opini publik dari perspektif bottom-up (akar rumput) sebelum sebuah lembaga resmi dibentuk sering kali terabaikan, sehingga berisiko menimbulkan resistensi atau ketidaksesuaian layanan di kemudian hari.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan ex-ante yang tidak hanya mengukur tingkat penerimaan masyarakat, tetapi juga memetakan secara komprehensif ekspektasi

multidimensi—mulai dari tuntutan efisiensi birokrasi, kebutuhan platform digital, hingga kekhawatiran terhadap komersialisasi layanan—dari perspektif pelaku UMKM dan masyarakat lokal. Berdasarkan kesenjangan dan kebaruan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opini masyarakat Kabupaten Tabalong terhadap pembentukan UPTD PLUT KUMKM. Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis mengenai partisipasi publik dalam transformasi kelembagaan daerah, tetapi juga menjadi landasan empiris yang krusial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsif, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk mengukur opini masyarakat Kabupaten Tabalong terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Tabalong. Mengingat tidak tersedianya kerangka sampel (sampling frame) yang komprehensif dan terdaftar untuk seluruh populasi pelaku UMKM di 12 kecamatan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan distribusi kuesioner secara convenience sampling (daring). Kriteria inklusi responden dalam penelitian ini adalah: (1) berdomisili di Kabupaten Tabalong, (2) merupakan pelaku usaha atau masyarakat yang mengetahui keberadaan program PLUT KUMKM, dan (3) bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Melalui teknik ini, diperoleh sebanyak 119 responden. Meskipun distribusi geografis menunjukkan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Murung Pudak (45%) dan Tanjung (21%), hal ini merefleksikan realitas di lapangan di mana kedua kecamatan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan lokasi operasional PLUT KUMKM yang paling intens, sehingga responden di wilayah ini lebih mudah dijangkau dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2024 menggunakan instrumen kuesioner daring (Google Form) yang terdiri dari 15 butir pernyataan yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Sebelum data dianalisis lebih lanjut, instrumen penelitian telah melalui uji kualitas data. Uji validitas konstruk dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment, di mana seluruh 15 butir pernyataan menunjukkan nilai r hitung $> r$ tabel (0,179 pada taraf signifikansi 5% dengan $N=119$) dan nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga seluruh butir dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai sebesar 0,874], yang berada di atas batas minimum 0,60, mengindikasikan bahwa instrumen ini memiliki konsistensi internal yang baik dan reliabel. Data yang telah teruji kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menyajikan distribusi frekuensi dan persentase jawaban responden secara sistematis, guna memberikan gambaran komprehensif mengenai opini masyarakat Tabalong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Demografis Responden: Komposisi Jenis Kelamin dan Distribusi Usia

Penelitian ini melibatkan 119 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling dari masyarakat Kabupaten Tabalong, dengan komposisi demografis yang mencerminkan keragaman pelaku usaha dan masyarakat umum di wilayah tersebut. Berdasarkan data jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan yang mencapai 102 orang atau setara dengan 86% dari total populasi sampel, sementara responden laki-laki hanya berjumlah 17 orang atau sekitar 14%. Dominasi responden perempuan ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan bahwa perempuan merupakan aktor utama dalam sektor usaha mikro dan kecil, sekaligus mencerminkan peran strategis perempuan dalam menggerakkan perekonomian rumah tangga dan komunitas lokal di Kabupaten Tabalong.

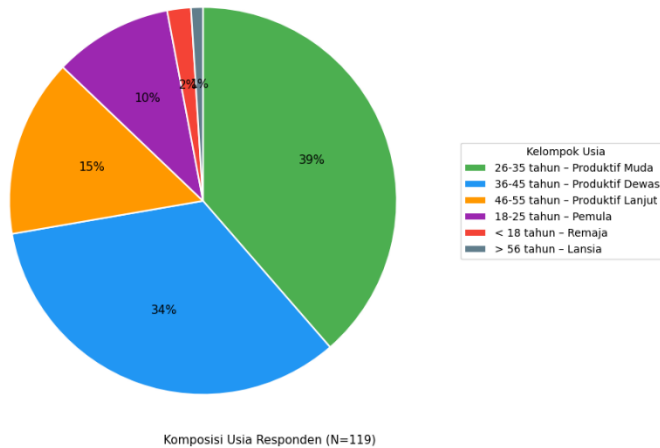
Dari segi distribusi usia, responden didominasi oleh kelompok usia produktif yang berada pada rentang 26 hingga 45 tahun, dengan total 86 orang atau sekitar 73% dari keseluruhan sampel. Kelompok usia 26–35 tahun menjadi yang paling representatif dengan 46 orang (39%), diikuti oleh kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 40 orang (34%). Proporsi ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden berada pada fase produktif dalam menjalankan usaha, di mana mereka telah memiliki pengalaman bisnis yang cukup matang namun masih terbuka terhadap inovasi dan pengembangan kapasitas kelembagaan melalui layanan UPTD PLUT KUMKM.

Sebaliknya, kelompok usia muda (18–25 tahun) dan usia lanjut (>56 tahun) memiliki representasi yang sangat terbatas, masing-masing hanya 12 orang (10%) dan 1 orang (1%). Kelompok usia di bawah 18 tahun pun hanya diwakili oleh 2 orang (2%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan keterlibatan dalam isu kelembagaan pemberdayaan UMKM masih terpusat pada kelompok usia dewasa produktif, sehingga diperlukan strategi sosialisasi yang lebih masif untuk menjangkau generasi muda dan pelaku usaha lanjut usia agar partisipasi dalam program UPTD PLUT KUMKM menjadi lebih inklusif dan merata.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Kategori	Sub-kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	17	14%
	Perempuan	102	86%
Usia	< 18 tahun	2	2%
	18–25 tahun	12	10%
	26–35 tahun	46	39%
	36–45 tahun	40	34%
	46–55 tahun	18	15%
	> 56 tahun	1	1%

Distribusi Responden Berdasarkan Usia



Gambar 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Latar Belakang Pendidikan dan Sebaran Geografis Responden

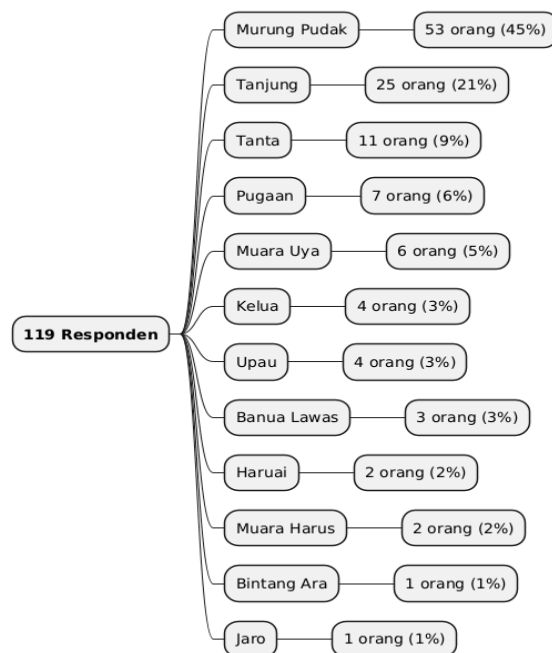
Tingkat pendidikan responden menunjukkan dominasi kelompok berpendidikan menengah, dengan 62 orang (52%) merupakan lulusan SMA/SMK/MA, diikuti oleh 35 orang (29%) yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1). Kelompok berpendidikan SMP/MTs tercatat sebanyak 14 orang (12%), sementara lulusan SD/MI hanya 4 orang (3%). Terdapat pula 3 orang (3%) lulusan D3 dan 1 orang (1%) lulusan S2. Komposisi ini menggambarkan bahwa mayoritas pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi responden memiliki bekal pendidikan formal yang memadai untuk memahami layanan kelembagaan, namun tetap memerlukan pendampingan teknis dan manajerial yang intensif dari UPTD PLUT KUMKM.

Ditinjau dari sebaran geografis, responden berasal dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Murung Pudak sebanyak 53 orang (45%) dan Kecamatan Tanjung sebanyak 25 orang (21%). Kedua kecamatan ini merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan di Tabalong, sehingga wajar jika tingkat partisipasi masyarakatnya dalam survei relatif lebih tinggi. Kecamatan Tanta menempati urutan ketiga dengan 11 responden (9%), diikuti oleh Pugaan (7 orang/6%), Muara Uya (6 orang/5%), serta kecamatan lainnya dengan proporsi di bawah 5%.

Sebaran geografis yang tidak merata ini mengindikasikan bahwa sosialisasi rencana pembentukan UPTD PLUT KUMKM masih terpusat di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan, sementara kecamatan-kecamatan perifer seperti Bintang Ara, Jaro, dan Muara Harus memiliki representasi yang sangat minim. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan komunikasi publik agar aspirasi pelaku usaha di wilayah pedesaan turut terakomodasi dalam perencanaan kelembagaan UPTD PLUT KUMKM ke depan.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan dan Asal Kecamatan

Kategori	Sub-kategori	Jumlah	Persentase
Pendidikan	SD/MI	4	3%
	SMP/MTs	14	12%
	SMA/SMK/MA	62	52%
	D3	3	3%
	S1	35	29%
	S2	1	1%
Kecamatan	Murung Pudak	53	45%
	Tanjung	25	21%
	Tanta	11	9%
	Pugaan	7	6%
	Muara Uya	6	5%
	Kelua	4	3%
	Upau	4	3%
	Banua Lawas	3	3%
	Haruai	2	2%
	Muara Harus	2	2%
	Bintang Ara	1	1%
	Jaro	1	1%



Gambar 2. Peta Sebaran Responden per Kecamatan di Kabupaten Tabalong

Pengalaman Usaha dan Durasi Kemitraan dengan PLUT KUMKM

Profil pengalaman usaha responden menunjukkan bahwa mayoritas telah menjalankan kegiatan ekonomi dalam jangka waktu yang cukup panjang, dengan 49 orang (41%) telah berusaha lebih dari 3 tahun. Kelompok yang telah menjalankan usaha selama 2 tahun dan 3 tahun masing-masing diwakili oleh 25 orang (21%), sementara pelaku usaha pemula dengan lama usaha 1 tahun tercatat sebanyak 20 orang (17%). Data ini mengindikasikan bahwa sampel penelitian didominasi oleh pelaku usaha yang telah mapan dan memiliki pemahaman mendalam mengenai tantangan operasional, sehingga opini mereka terhadap pembentukan UPTD PLUT KUMKM dapat dianggap sebagai refleksi kebutuhan riil di lapangan.

Dari sisi kemitraan dengan PLUT KUMKM, mayoritas responden merupakan mitra baru, dengan 32 orang (27%) yang baru menjalin kerjasama kurang dari 1 tahun dan 38 orang (32%) yang telah menjadi mitra selama 1 tahun. Responden yang telah menjadi mitra selama 2 tahun berjumlah 27 orang (23%), sedangkan yang telah bermitra selama 3 tahun hanya 22 orang (18%). Pola ini menunjukkan bahwa PLUT KUMKM Tabalong terus mengalami penambahan mitra secara konsisten setiap tahunnya, namun masih perlu memperkuat retensi mitra jangka panjang agar manfaat pendampingan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Kombinasi antara pengalaman usaha yang relatif panjang dan durasi kemitraan yang masih dominan di kisaran 1–2 tahun mengisyaratkan bahwa banyak pelaku usaha yang sebenarnya telah lama berkecimpung di dunia usaha, namun baru belakangan ini mulai mengakses layanan pendampingan formal dari PLUT KUMKM. Fenomena ini membuka peluang besar bagi UPTD PLUT KUMKM ke depan untuk mengoptimalkan layanan bagi pelaku usaha yang telah berpengalaman namun belum tersentuh program pemberdayaan, sekaligus memperkuat program inkubasi bagi wirausaha pemula agar dapat bertahan dalam ekosistem bisnis yang kompetitif.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha dan Lama Menjadi Mitra PLUT

Kategori	Sub-kategori	Jumlah	Persentase
Lama Usaha	1 tahun	20	17%
	2 tahun	25	21%
	3 tahun	25	21%
	> 3 tahun	49	41%
Lama Menjadi Mitra PLUT	< 1 tahun	32	27%
	1 tahun	38	32%
	2 tahun	27	23%
	3 tahun	22	18%

Persepsi Masyarakat terhadap Kebutuhan dan Manfaat UPTD PLUT KUMKM

Hasil survei opini masyarakat menunjukkan tingkat dukungan yang sangat tinggi terhadap pembentukan UPTD PLUT KUMKM di Tabalong, dengan 91% responden menyatakan bahwa lembaga ini diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan terkait usaha. Angka ini mencerminkan adanya kebutuhan riil di tengah pelaku usaha terhadap keberadaan satu pintu layanan yang terintegrasi, mengingat selama ini akses terhadap informasi, pendampingan, dan fasilitasi usaha masih tersebar di berbagai instansi sehingga menyulitkan koordinasi. Keyakinan serupa juga tercermin dari 89% responden yang meyakini bahwa UPTD PLUT akan meningkatkan efisiensi proses perizinan dan administrasi usaha, serta 91% lainnya yang mengharapkan lembaga ini menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha.

Dari perspektif dampak ekonomi, 88% responden percaya bahwa pendirian UPTD PLUT KUMKM akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Tabalong. Optimisme ini juga sejalan dengan keyakinan 88% responden lainnya yang menyatakan bahwa UPTD PLUT akan mendorong inovasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah di daerah. Selain itu, 87% responden menyatakan kesiapan untuk menggunakan layanan UPTD PLUT jika prosesnya lebih cepat dan efisien, yang menunjukkan bahwa ekspektasi utama masyarakat adalah adanya percepatan dan penyederhanaan birokrasi dalam setiap layanan yang ditawarkan.

Tingginya tingkat penerimaan ini juga didukung oleh persepsi positif terhadap komunikasi pemerintah daerah, di mana 83% responden menilai bahwa sosialisasi terkait rencana pendirian UPTD PLUT telah dilakukan dengan cukup baik. Sebanyak 83% responden juga yakin bahwa UPTD PLUT akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengurus berbagai izin dan persyaratan usaha. Konsensus yang kuat ini menjadi modal sosial yang berharga bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan peningkatan status PLUT KUMKM menjadi UPTD, sekaligus menjadi legitimasi empiris bahwa kebijakan ini memang ditujukan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Tabel 4. Persepsi Positif Masyarakat terhadap Kebutuhan dan Manfaat UPTD PLUT

No.	Instrumen Survei	Persentase
1	UPTD PLUT diperlukan untuk mempermudah akses layanan usaha	91%
2	UPTD PLUT akan meningkatkan efisiensi perizinan dan administrasi	89%
3	UPTD PLUT berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah	88%
6	Responden siap menggunakan layanan UPTD PLUT jika proses cepat	87%
7	Komunikasi pemerintah daerah terkait rencana UPTD cukup baik	83%
8	UPTD PLUT diharapkan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan	91%
9	UPTD PLUT akan mengurangi waktu pengurusan izin usaha	83%
11	UPTD PLUT akan mendorong inovasi dan pertumbuhan UKM	88%
15	PLUT-KUMKM Tabalong perlu menjadi UPTD untuk meningkatkan pelayanan	88%

Kekhawatiran dan Tantangan dalam Implementasi UPTD PLUT KUMKM

Meskipun tingkat dukungan secara keseluruhan sangat tinggi, survei ini juga mengungkap adanya kekhawatiran yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebanyak 60% responden menyatakan kekhawatiran bahwa biaya penggunaan layanan di UPTD PLUT akan menjadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya, sementara 59% responden merasa bahwa informasi tentang layanan yang disediakan oleh UPTD PLUT masih kurang jelas. Kedua temuan ini menjadi sinyal penting bahwa meskipun masyarakat menyambut baik gagasan pembentukan UPTD, mereka masih menyimpan keraguan terkait aspek transparansi biaya dan kejelasan informasi layanan yang akan ditawarkan.

Tantangan lain yang teridentifikasi adalah persepsi terkait integrasi layanan dan pengurangan birokrasi, di mana hanya 73% responden yang merasa bahwa ketersediaan layanan terintegrasi di UPTD PLUT akan mampu mengurangi birokrasi yang selama ini memperlambat perkembangan usaha. Angka ini, meskipun masih mayoritas, relatif lebih rendah dibandingkan indikator dukungan lainnya, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih skeptis terhadap kemampuan lembaga baru dalam memangkas rantai birokrasi yang kompleks. Keraguan ini wajar mengingat pengalaman masa lalu dengan berbagai lembaga pemerintah yang sering kali tumpang tindih dan tidak memberikan nilai tambah nyata bagi pelaku usaha.

Selain itu, 76% responden menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan layanan di UPTD PLUT daripada perbaikan layanan yang sudah ada sebelumnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya harapan masyarakat agar pemerintah tidak hanya menambah lembaga baru, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang ditawarkan benar-benar unggul dan memberikan diferensiasi nyata dibandingkan layanan eksisting. Dengan demikian, tantangan utama ke depan adalah membuktikan melalui kinerja nyata bahwa UPTD PLUT KUMKM mampu menjawab keraguan masyarakat terkait biaya, informasi, dan efektivitas layanan.

Tabel 5. Kekhawatiran dan Tantangan yang Diidentifikasi Responden

No.	Instrumen Survei	Persentase
4	Informasi layanan UPTD PLUT masih kurang jelas	59%
5	Kekhawatiran biaya layanan UPTD PLUT lebih mahal	60%
12	Layanan terintegrasi akan mengurangi birokrasi	73%
14	Pemerintah harus fokus pada peningkatan layanan UPTD PLUT	76%

Partisipasi Masyarakat dan Arah Pengembangan Layanan UPTD PLUT KUMKM

Aspek partisipasi masyarakat menjadi sorotan penting dalam survei ini, dengan 84% responden menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan dan implementasi UPTD PLUT KUMKM adalah hal yang penting. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya ingin menjadi penerima pasif dari layanan pemerintah, tetapi juga ingin dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan ekonomi mereka. Prinsip partisipasi ini sejalan dengan

semangat otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kebijakan publik seharusnya disusun secara kolaboratif antara pemerintah dan pemangku kepentingan.

Terkait dengan arah pengembangan layanan, 82% responden berharap agar UPTD PLUT menyediakan informasi yang mudah diakses melalui platform daring seperti website dan aplikasi. Permintaan ini mencerminkan kebutuhan akan transformasi digital dalam layanan publik, terutama di tengah meningkatnya adopsi teknologi di kalangan pelaku usaha. Selain itu, 88% responden secara tegas menyatakan bahwa PLUT-KUMKM Tabalong perlu ditingkatkan statusnya menjadi UPTD demi meningkatkan pelayanan terhadap koperasi dan UMKM di Tabalong, yang menunjukkan adanya mandat sosial yang kuat dari masyarakat untuk merealisasikan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, hasil survei ini menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Tabalong memiliki optimisme yang tinggi terhadap pembentukan UPTD PLUT KUMKM, sekaligus memberikan catatan konstruktif terkait aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Kombinasi antara dukungan mayoritas, partisipasi yang diharapkan, dan tuntutan akan layanan digital yang modern menjadi peta jalan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam merancang kelembagaan UPTD PLUT KUMKM ke depan. Dengan merespons secara serius seluruh masukan ini, UPTD PLUT KUMKM Tabalong berpotensi menjadi model lembaga pemberdayaan UMKM yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada dampak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Tabel 6. Harapan dan Arah Pengembangan Layanan UPTD PLUT KUMKM

No.	Instrumen Survei	Persentase
10	Informasi harus mudah diakses melalui platform daring	82%
13	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi penting	84%
15	PLUT-KUMKM Tabalong perlu menjadi UPTD	88%

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa peningkatan status PLUT KUMKM menjadi UPTD memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat di Kabupaten Tabalong, di mana 88% responden mendukung kebijakan ini dan 91% meyakini lembaga tersebut akan mempermudah akses layanan usaha. Dukungan mayoritas ini mengindikasikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha secara sadar membutuhkan sebuah institusi formal yang memiliki kewenangan, struktur anggaran, dan standar operasional yang jelas untuk menjembatani berbagai kendala usaha mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Wibowo, A., & Santoso (2023) yang menemukan bahwa transformasi kelembagaan pelayanan publik menjadi UPTD atau BLUD secara signifikan meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah daerah, karena adanya jaminan kepastian hukum dan keberlanjutan program yang sebelumnya sering kali terputus akibat keterbatasan status kelembagaan. Lebih lanjut, Moiwend et al. (2026) DARismawati et al. (2025) menegaskan bahwa penguatan institusi layanan terpadu di tingkat daerah merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal.

Ekspektasi masyarakat terhadap dampak ekonomi dan fungsi pendampingan juga terlihat sangat tinggi, dengan 88% responden yakin UPTD akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta 91% yang mengharapkan adanya layanan konsultasi dan pendampingan. Temuan ini menempatkan UPTD PLUT KUMKM bukan sekadar sebagai kantor administrasi, melainkan sebagai inkubator bisnis dan katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Studi empiris dari Ilham (2022) mendukung temuan ini, di mana layanan pendampingan komprehensif yang disediakan oleh pusat layanan terpadu terbukti mampu meningkatkan tingkat kelangsungan usaha (*business survival rate*) dan kapasitas inovasi produk UMKM hingga 35% dalam dua tahun pertama. Selain itu, penelitian dari Saputra et al. (2026) dan Hidayah & Atfal (2025) menegaskan bahwa di era pasca-pandemi, keberadaan lembaga pendampingan yang mengintegrasikan akses pasar, teknologi, dan manajerial menjadi faktor penentu utama bagi ketahanan dan daya saing ekonomi lokal, sehingga harapan masyarakat Tabalong terhadap fungsi ini sangat beralasan dan berdasar pada tren nasional.

Meskipun dukungan secara keseluruhan sangat tinggi, terdapat temuan kritis yang menjadi catatan penting, yaitu 60% responden yang mengkhawatirkan kenaikan biaya layanan dan 59% yang merasa informasi mengenai layanan UPTD masih kurang jelas. Anomali ini mengindikasikan adanya celah komunikasi dan kerentanan terkait persepsi biaya yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah. Kekhawatiran ini sangat relevan mengingat karakteristik pelaku UMKM di Tabalong yang umumnya beroperasi dengan margin keuntungan tipis, rata-rata di bawah 20%, dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap biaya tambahan sekecil apapun.

Akar penyebab kekhawatiran biaya ini dapat ditelusuri dari tiga faktor struktural di lapangan. *Pertama*, pengalaman historis pelaku UMKM dengan berbagai program pemerintah yang awalnya digratiskan namun kemudian "dikomersialisasi" secara bertahap setelah lembaga berubah status atau berganti kepemimpinan. Fenomena *bait-and-switch* ini telah menciptakan trauma kolektif di kalangan pelaku usaha, di mana mereka cenderung mengasumsikan bahwa setiap peningkatan status kelembagaan, termasuk transformasi menjadi UPTD, akan diikuti oleh rasionalisasi biaya melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi baru. *Kedua*, dominasi sektor UMKM informal di Tabalong, yang menurut data BPS setempat mencapai lebih dari 70% dari total pelaku usaha membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan regulasi. Pelaku usaha informal terbiasa beroperasi di luar sistem perizinan formal, sehingga setiap upaya "formalisasi" melalui UPTD secara otomatis diasosiasikan dengan beban administratif dan finansial baru. *Ketiga*, adanya persepsi bahwa transformasi menjadi UPTD akan diikuti oleh penambahan struktur birokrasi yang pada akhirnya membutuhkan pendanaan operasional, yang dikhawatirkan akan dibebankan kepada pengguna layanan.

Sementara itu, ketidakjelasan informasi (59%) memiliki akar penyebab yang berbeda namun saling terkait. Faktor utama adalah asimetri informasi yang kronis antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di wilayah periferal. Kabupaten Tabalong memiliki karakteristik geografis yang unik dengan 12 kecamatan yang tersebar, di mana kecamatan-kecamatan seperti Bintang Ara, Jaro, dan Muara Harus memiliki akses internet yang terbatas dan jarak tempuh ke pusat kota yang cukup jauh. Survei ini sendiri mengonfirmasi hal tersebut,

di mana 66% responden berasal dari dua kecamatan pusat (Murung Pudak dan Tanjung), sementara kecamatan periferan hanya terwakili minimal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital dan informasi yang lebar: pelaku usaha di wilayah pusat mungkin telah terpapar sosialisasi UPTD melalui media sosial atau pertemuan langsung, sementara pelaku usaha di wilayah pinggiran hanya menerima informasi secara tidak lengkap melalui mulut ke mulut (*word-of-mouth*) yang sering kali terdistorsi.

Lebih jauh, ketidakjelasan ini juga diperparah oleh terutama di era media sosial di mana rumor dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Penelitian dari Manullang & Rahmanita (2025) dan Hermawan & Halbi (2026) menunjukkan bahwa transparansi informasi dan kejelasan struktur biaya merupakan prediktor utama bagi kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik baru; ketika informasi tidak dikomunikasikan secara proaktif dan terstruktur, asumsi negatif mengenai komersialisasi layanan cenderung muncul dan mengakar. Oleh karena itu, temuan ini menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah Tabalong untuk tidak hanya merancang skema layanan non-finansial yang secara eksplisit digratiskan atau disubsidi, tetapi juga mengkampanyekannya secara masif melalui saluran-saluran yang menjangkau wilayah periferan, seperti kelompok WhatsApp pelaku usaha, pertemuan desa, hingga kolaborasi dengan tokoh masyarakat lokal guna memitigasi resistensi dan membangun kepercayaan sejak tahap pra-implementasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk memastikan keberhasilan pembentukan UPTD PLUT KUMKM Tabalong, dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong sebagai leading sector yang bertanggung jawab penuh dalam implementasinya. Pertama, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong perlu segera menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Bupati atau setidaknya Pedoman Teknis Layanan yang transparan, termasuk skema biaya yang jelas dan komitmen terhadap layanan non-finansial yang digratiskan. Dokumen formal ini harus secara eksplisit menyebutkan jenis layanan yang tidak dipungut biaya (seperti konsultasi bisnis, pendampingan legalitas, dan pelatihan kapasitas) guna memitigasi kekhawatiran 60% responden terkait kenaikan biaya. Dinas juga perlu mengkampanyekan pedoman ini melalui saluran-saluran yang menjangkau pelaku usaha di seluruh kecamatan, termasuk wilayah periferan seperti Bintang Ara, Jaro, dan Muara Harau.

Kedua, transformasi digital layanan harus menjadi prioritas utama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong untuk memenuhi ekspektasi 82% responden yang menginginkan akses informasi yang mudah dan cepat. Dinas perlu mengembangkan platform daring terpadu (website dan aplikasi mobile) yang tidak hanya menyediakan informasi layanan, tetapi juga memungkinkan pengajuan permohonan layanan secara online, pelacakan status permohonan, hingga mekanisme umpan balik digital. Hal ini sejalan dengan tuntutan digitalisasi yang menjadi salah satu temuan kritis dalam penelitian ini. Ketiga, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong perlu melembagakan mekanisme partisipasi publik yang partisipatif secara berkelanjutan, misalnya melalui pembentukan Forum Konsultasi UMKM yang melibatkan perwakilan asosiasi pelaku usaha, koperasi, dan komunitas wirausaha muda. Forum ini harus bertemu secara berkala (minimal setiap kuartal)

untuk mengevaluasi kinerja layanan, menerima masukan, dan memastikan kebijakan tetap responsif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan. Partisipasi ini akan membangun sense of ownership di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima layanan pasif, tetapi juga mitra aktif dalam pengembangan UPTD PLUT KUMKM.

Keempat, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja UPTD PLUT KUMKM dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal. Evaluasi ini harus mencakup indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, seperti jumlah pelaku usaha yang terlayani, tingkat kepuasan pelanggan, waktu rata-rata penyelesaian layanan, dan dampak ekonomi yang dirasakan (misalnya peningkatan omzet atau penambahan tenaga kerja). Hasil evaluasi ini harus dipublikasikan secara transparan melalui website dinas dan media sosial, sehingga akuntabilitas kelembagaan dapat dijaga dan kepercayaan publik terus dibangun. Dengan keempat rekomendasi strategis ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong memiliki peta jalan yang jelas untuk memastikan bahwa UPTD PLUT KUMKM tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan pelaku koperasi dan UMKM di Kabupaten Tabalong.

DAFTAR PUSTAKA

- Boy, M., Gitayuda, S., & Mawardi, M. A. (2022). Pengaruh Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Industri Tas dan Koper. *Benchmark*, 2(2), 115–123. <https://doi.org/10.46821/BENCHMARK.V2I2.249>
- Fuadi, H., Ngalmun, &, Keadilan, P., Kabupaten Banjar, S., & Selatan, K. (2026). Transformasi Ekonomi Lokal dalam Agenda Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan UMKM, dan Hilirisasi Produk Lokal di Kalimantan Selatan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 185–199. <https://doi.org/10.71456/SUR.V4I2.1612>
- Hermawan, A., & Halbi. (2026). Digitalisasi Desa Bala: Pengembangan Website sebagai Wadah Informasi dan Layanan Publik. *Macoa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 57–65. <https://doi.org/10.59903/MACOAJURNALPKM.V3I1.267>
- Hidayah, S., & Atfal, N. R. (2025). Pendampingan Desain Produk dan Branding Tenun Sukarara untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Lokal di Era Ekonomi Kreatif. *TERAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial Budaya*, 2(1), 16–22. <https://doi.org/10.71094/TERAS.V2I1.211>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.36722/JPM.V5I1.1753>
- Kirana, A. A., Abdillah, S., Amalia, N., & Dewi, R. S. (2023). Transformasi UMKM Kuliner : Mengintegrasikan Etika Bisnis Islam dan Inovasi. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 1(1),

11–18. <https://doi.org/10.65256/F3AMHC34>

- Manullang, J., & Rahmanita. (2025). Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi dan Transparansi Informasi terhadap Kepercayaan Audiens dan Tingkat Keterlibatan di Media Digital TVRI. *Medium*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.25299/MEDIUM.V13I1.20166>
- Moiwend, Y. O., Kistyanto, A., & Wardoyo, D. W. (2026). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sebagai Strategi Meningkatkan Ekonomi Keberlanjutan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 7(3), 1905–1922. <https://doi.org/10.37385/msej.v7i3.10384>
- Mulyaningsih, T., Bintariningtyas, S., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2022). UMKM Naik Kelas dengan Go Modern Bagi Sektor Usaha Kuliner di Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 4(2), 117–122. <https://doi.org/10.31092/KUAT.V4I2.1808>
- Radyanto, M. R., Adhi, A., Hayati, E. N., & Prihastono, E. (2023). Pemberdayaan UMKM di Karesidenan Semarang dan Banyumas Jawa Tengah Melalui Pendampingan Usaha Kuliner yang Sistematis dan Berkelanjutan. *Surya Abdimas*, 7(3), 414–421. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i3.2990>
- Rismawati, Amalia, R., Zhakirah, D., Lili, A. S., Fadillah, A. A., & Basir, S. (2025). Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kota Makassar. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 2(4), 182–196. <https://doi.org/10.70182/JCA.V2I4.1382>
- Sadly, E., Naeruz, M., & Amrani, A. (2026). Analisis Program Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Peran Pemerintah Kecamatan Dan Partisipasi Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(2), 2616–2625. <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10586>
- Said, A., & Ferdhianzah, H. J. (2025). Dampak Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Malang Raya, Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 11(3), 163–175. <https://doi.org/10.29210/020254713>
- Saputra, M. A., Rantisi, H. T., Khuzaimah, M., & Fawwaz, H. (2026). Transformasi Digital UMKM dan Ketahanan Ekonomi Lokal: Analisis Adopsi Fintech, Literasi Digital, dan Daya Saing Usaha Mikro di Era Pasca Pandemi Indonesia 2023-2025. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 2719–2727. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8883>
- Wibowo, A., & Santoso, P. (2023). Structured Research Process: Ensuring Validity and Reliability. *Research Methodology Journal*, 12(1), 30–45.